

Kesiapan Menyambut MEA

Oleh Chusnan Maghribi

KAMIS 31 Desember 2015 menjadi hari bersejarah bagi ASEAN menyusul dimulainya pemberlakuan ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA) sebagai sebuah agenda integrasi ekonomi sepuluh negara anggota ASEAN. Tujuannya meminimalisasi (menghapus) hambatan-hambatan dalam melakukan kegiatan ekonomi perdagangan, investasi, dan jasa intra-anggota.

Penghapusan hambatan-hambatan itu dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta sanggup bersaing dengan Tiongkok ataupun India terutama dalam menarik investasi asing. Penanaman modal di kawasan Asia Tenggara sangat dibutuhkan guna meningkatkan ketersediaan lapangan kerja serta menaikkan derajat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

MEA adalah satu dari tiga pilar Komunitas ASEAN, sebuah bangunan kerja sama dengan kinerja organisasi modern yang prokemakmuran dan kesejahteraan segenap rakyat di seluruh (sepuluh) negara anggota ASEAN. Dua pilar lainnya adalah ASEAN Security Community (ASC) dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC).

Pertanyaan mendasar dari sepuluh negara anggota (menjelang atau saat pelepas pemberlakuan MEA ditiup) tentulah sama, yakni sejauh mana kesiapan akhir masing-masing anggota termasuk Indonesia menyambut (menjalani) MEA?

Idealnya kesiapan segenap anggota ASEAN, baik menyangkut penyediaan aturan main sektor yang diliberalisasi (deregulasi) maupun terkait praktik di lapangan, berada pada tingkat tinggi agar tidak gagap saat menjalaninya hingga memetik manfaat (keuntungan) maksimal. Namun, kondisi ideal seperti itu agaknya tidak (belum) terpenuhi oleh satu pun anggota saat MEA mulai diberlakukan akhir 2015 ini.

Dari segi penyediaan aturan main sektor yang diliberalisasi (dikurangi ataupun dibebaskan/ditindakan bea masuknya),

sebagai anggota paling siap. Hingga awal 2015 Indonesia sudah mencapai 82 persen dari total sektor yang mesti diliberalisasi. Sementara kesiapan rata-rata sepuluh anggota ASEAN baru 74,5 persen.

Tetapi dari segi praktik di lapangan, banyak kalangan menilai kesiapan Indonesia tidaklah setinggi itu. Bahkan Indonesia dipandang inferior dibanding kesiapan sejumlah anggota lain ASEAN khususnya Singapura, Thailand, dan Malaysia. Hal ini lantaran (misalnya) Indonesia belum memiliki strategi industri yang komprehensif dan terarah serta rendahnya tingkat pendidikan mayoritas tenaga kerja Indonesia (TKI).

Daya Saing

Akibat ketiadaan strategi industri yang komprehensif dan terarah, pasar domestik Indonesia diperkirakan bakal semakin kebanjiran produk-produk jadi dari sesama negara anggota ASEAN terutama tiga negara tersebut tadi di atas. Dengan Malaysia misalnya, Indonesia sejauh ini memang menjadi eksportir coklat terbesar ke Negeri Jiran itu. Tetapi, Indonesia juga mengimpor besar-besaran bahan jadi dari Malaysia seperti produk-produk tekstil dan obat-obatan herbal. Malah di wilayah-wilayah perbatasan (di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara) dengan Malaysia impor Indonesia mencakup produk-produk lebih luas lagi termasuk barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, dan mi instan. Dengan demikian Indonesia kehilangan banyak nilai tambah yang diperoleh Malaysia.

Ketidaksiapan Indonesia juga tercermin dengan masih ren-

dahnya daya saing produk buah di pasar global. Indonesia menempati peringkat ke-20 besar di dunia sebagai produsen tujuh jenis buah, yaitu alpukat, pisang, papaya, jeruk siam, semangka, nanas, serta gabungan mangga, manggis, dan jambu biji. Tetapi, dari semua itu hanya nanas yang sanggup bersaing di pasar internasional. Nanas biasa diolah dalam bentuk kalengan ataupun jus konsentrat untuk diekspor. Menurut Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Herry Suhardiyanto, rendahnya daya saing produk buah nusantara disebabkan oleh banyak masalah, di antaranya inkonsistensi dan kontinuitas produksi serta pemakaian teknologi sederhana.

Sementara itu, rendahnya tingkat pendidikan mayoritas TKI dikhawatirkan bisa menjadi bumerang bagi ketenagakerjaan di Tanah Air. Para TKI berpendidikan rendah dipastikan akan sulit memenuhi kriteria tenaga kerja profesional dan produktif yang dibutuhkan dunia usaha pada umumnya. Akibatnya, mereka kalah berkompetisi meski di bursa kerja domestik sekalipun, dan mau tak mau mesti menerima kenyataan bekerja di sektor informal.

Jadi kesimpulannya, dari sepuluh negara anggota ASEAN tampak tidak satu pun anggota benar-benar siap seratus persen saat menyambut pemberlakuan MEA mulai 31 Desember 2015 ini. Bila diranking, Singapura bersama Thailand dan Malaysia menjadi tiga negara paling siap terutama dalam praktik menjalani MEA.

Sementara Indonesia kelihatannya hanya lebih siap dalam hal penyediaan aturan main liberalisasi sektor. Dalam praktik, Indonesia dikhawatirkan keteteran menghadapi produk-produk asal Singapura, Thailand, dan Malaysia.

Pelaksanaan satu tahun pertama MEA pada 2016 nanti tentu harus dievaluasi secermat dan seteliti mungkin: sektor mana yang unggul dan mana yang lemah, agar pelaksanaan MEA pada tahun kedua dan seterusnya lebih banyak tampil menjadi pemenang ketimbang pecundang. (47)

—Chusnan Maghribi,
alumnus Hubungan
Internasional FISIP
Universitas
Muhammadiyah

